

**ETHNOGRAPHIC GAYO COMMUNITY OF TAMPUR PALOH
VILLAGE IN THE LOWER TAMIANG RIVER, SIMPANG JERNIH
DISTRICT, EAST ACEH REGENCY, ACEH PROVINCE**

**ETNOGRAFI MASYARAKAT GAYO DESA TAMPUR PALOH DI
HILIR SUNGAI TAMIANG, KECAMATAN SIMPANG JERNIH,
KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH**

Muhammad Farhan Zuldiansyah¹, Fikarwin Zuska²
^{1,2}Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Correspondence: farhanzuldiansyah@gmail.com

ABSTRACT:

Formal education in Tampur Paloh Village is lagging in all aspects, especially in the field of communication and the feasibility of facilities and support. This is the main problem of formal education there which leads to the low competitiveness of local children in the regional and even national arena. This study will discuss the situation and backwardness of rural communities downstream of the Tamiang River, Simpang Jernih District, East Aceh Regency, Aceh Province by looking at the dynamics that occur in formal schools. This research was conducted using qualitative descriptive methods with data sourced from participatory observations in the region. Explain clearly the facts on the ground and to what extent they lag behind the relevance of today's education. By being exposed to the limitations of formal schools, the local community can invite further steps to address the limitations of the quality of these formal studies.

Keywords: *Formal Education Remote Village, Remote Village.*

ABSTRAK:

Pendidikan Formal di Desa Tampur Paloh mengalami ketertinggalan dari segala aspek, khususnya di bidang komunikasi dan kelayakan sarana dan penunjang. Hal tersebut menjadi masalah utama pendidikan formal disana yang berujung menjadi rendahnya daya saing anak setempat di kancah daerah bahkan nasional. Kajian ini akan membahas keadaan dan ketertinggalan masyarakat pedalaman di Hilir Sungai Tamiang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan melihat dinamika yang terjadi di sekolah formal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari observasi partisipatif di wilayah tersebut. Menjabarkan dengan jelas fakta di lapangan dan sampai sejauh apa ketertinggalan mereka terhadap kerelvan pendidikan zaman sekarang. Dengan tereksposnya keterbatasan sekolah formal masyarakat setempat dapat mengundang langkah lanjutan penanganan keterbatasan kualitas studi formal tersebut.

Kata Kunci: *Desa Terpencil, Pendidikan Formal Desa terpencil.*

Article Info

Received	:	January 2022
Accepted	:	January 2022
Published	:	January 2022
DOI	:	https://doi.org/10.30872/psd.v3i1.38

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Dalam jurnal ini akan membahas mengenai dinamika studi formal di Desa Tampur Paloh yang mengalami ketertinggalan dari kebanyakan sekolah yang terdapat di Indonesia. Pendidikan merupakan aspek penting bagi keberlanjutan masa depan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sedangkan pengertian pendidikan menurut H. Horne, adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia (Horne, 1904). Herman Harrell Horne (1874-1946), seorang filsuf dan pendidik Amerika, adalah juru bicara terkemuka untuk idealisme filosofis dalam teori dan praktik pendidikan selama paruh pertama abad kedua puluh. Meskipun ia tidak mengaku menulis karya teologis, ia menganjurkan pendekatan spiritual dan agama untuk pendidikan. Dia adalah seorang pendidik yang serius dan seorang Kristen yang bijaksana; karena itu, dia layak untuk dipertimbangkan dengan cermat.

Menurut UUD Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 bab 1 poin 11 tentang sistem pendidikan nasional Pendidikan formal jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Formal dapat digunakan untuk mengukur tingkatan kapasitas tertentu pada seseorang. Tentu bukan hanya pendidikan formal yang dapat menjadi tolak ukur tersebut, selain itu ada pendidikan informal yang merupakan pendidikan di luar kelas seperti keluarga lingkungan dll. Tapi pada konteks ini kita akan membahas pendidikan formal, karena pendidikan formal lebih sistematis dan terstruktur untuk menjadi tolak ukur kapasitas tersebut.

Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, hal itu dijelaskan Pasal 2 Perpres: Pasal 2 (1) Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria: (a) perekonomian masyarakat, (b) sumber daya manusia, (c) sarana dan prasarana, (d) kemampuan keuangan daerah, (e). aksesibilitas; dan (f) karakteristik daerah.

Mengetahui ketertinggalan desa dan pendidikan formal daerah terpencil tentu dapat membuka ruang diskusi baru serta dapat memicu langkah baru ke arah pembangunan, pemberdayaan, yang berdampak pada kemajuan sumber daya manusia di daerah terkait, sekaligus menjangkau segala pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut untuk melaksanakan kewajiban mereka. Dengan demikian semakin meningkatlah penerapan sila yang ke lima ke seluruh pelosok negeri.

Terdapat beberapa hal spesifik yang menjadi harapan warga setempat kepada pemerintah dan unsur lain yang bertanggung jawab yaitu, (a) akses jalan dari Kuala Simpang menuju Tampur Paloh, (b) jaringan seluler, (c) tenaga pengajar tambahan, (d) infrastruktur pendukung pembelajaran. Besar sekali harapan warga setempat agar pemerintah memasukan daerah mereka ke daftar prioritas perencanaan pembangunan agar mereka bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang sudah maju.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan dan menggambarkan langsung keadaan dan keterbatasan pendidikan formal setempat sehingga bisa menjadi salah satu acuan untuk mendobrak keterpencilan daerah dan sekolah tersebut.

2. METODE

Metode yang digunakan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk dapat menggambarkan secara gamblang fakta yang terdapat di lapangan. Penelitian juga dilakukan dengan observasi partisipatif yaitu dimana peneliti terlibat dalam kegiatan harian orang yang diteliti, berlangsung selama 2 bulan dengan live in terhitung pada tanggal 13 September sampai 13 November dan tinggal di rumah masyarakat setempat Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur.

2.1. Lokasi Penelitian

Desa Tampur Paloh merupakan 1 dari 9 desa di Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Aceh Timur, yang berbatasan langsung dengan desa Tampur Boor dan desa Melidi. Desa tersebut memiliki luas 130,00 km². Lajur yang ditempuh dari Kuala Simpang merupakan lajur Sungai, dengan menggunakan getek berdurasi 5-6 jam karena melawan arus sungai, namun hal itu tidak berlaku ketika kita kembali dari Tampur menuju Kuala Simpang yang hanya berdurasi sekitar 3-4 jam.

Perjalanan menyusuri Sungai Tamiang yang indah dan asri, kiri kanan terlihat hutan yang rindang dan alami. Setelah melewati Desa Simpang, Desa Batu Sumbang, spot kearifan lokal batu katak, dan Desa Melidi.

Sehingga sampai di desa tersebut, Getek yang digunakan merupakan milik pribadi masyarakat yang berasal dari berbagai desa seputaran Tampur Paloh, Tampur Boor, Melidi, dan Batu Sumbang. Dulu terdapat getek inventaris desa yang belakangan sudah rusak dan tidak beroperasi lagi, sehingga para penumpang wajib membayar ongkos jasa transportasi getek. Harganya berada di kisaran Rp.500.000 sd Rp.700.000 per trip, biasanya para penumpang memakai sistem rental bersama, dengan cara mencari rekan menyewa sekitar 10 sampai 14 orang, sehingga biaya penyewaan menjadi lebih murah.

2.2. Cara Pengumpulan Data

Data Primer didapatkan dari hasil wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait, media peramban, dan buku buku pendukung. Data dianalisis secara deskriptif untuk menjabarkan keadaan langsung sekolah formal di lapangan dan melihat keteringgalannya dibanding sekolah formal di tempat pada umumnya.

Penentuan informal didasari dengan mengklasifikasi informan pangkal, informan biasa dan informan kunci yang mencakup masyarakat setempat yang ada di Desa Tampur Paloh, tenaga pengajar, kepala yayasan, kepala sekolah, perangkat desa, orang tua murid, dan peserta didik. Tidak terdapat angka patokan khusus setiap informan mengingat data di kumpulkan tergantung kondisi dan kebutuhan selama pengumpulan data berlangsung.

2.3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di penelitian ini merupakan reduksi data. Menurut Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994), reduksi data merupakan langkah penyederhanaan data sesuai kebutuhan untuk memudahkan pengambilan informasi. Data yang terkumpul dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan kurang penting. Disamping itu, peneliti dapat menyimpan data yang dibutuhkan untuk penelitiannya dan membuang data yang tidak diperlukan untuk penelitiannya. Hal ini membuat data lebih sederhana dan lebih jelas dan membuatnya lebih mudah untuk dibawa ke tingkat berikutnya.

Siswa dan wali siswa di wilayah wilayah pada umumnya di Indonesia sangat mendukung PBM (proses belajar mengajar) karena hal tersebut bagi mereka diyakini merupakan faktor penting untuk menunjang masa depan siswa menjadi lebih baik. sangat umum kita temui di lingkungan kita respon positif tentang pembelajaran 12 tahun yang terdiri dari sd, smp, dan sma sehingga mayoritas kita menyadari bahwa argumen bahwa penting sekolah 12 tahun merupakan hal yang tidak terdebatkan dan disepakati oleh seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia.

Tidak semua masyarakat sepakat tentang pentingnya wajib sekolah 12 tahun. Hal demikian dapat kita temukan di desa pedalaman Aceh Timur Kecamatan Simpang Jernih tepatnya di Desa Tampur Paloh. Tampur Paloh merupakan desa yang terletak di Hulu sungai Tamiang dengan memakan waktu 6 perjalanan namun hal itu tidak berlaku untuk perjalanan ke hilir sungai tepatnya dermaga Kota Tamiang disebabkan perjalanan menuju desa tersebut melawan arus sungai sebaliknya menuju dermaga Kota Tamiang mengikuti arus sungai. Sangat banyak sekali hal-hal yang menarik yang dapat diulik dari Desa Tampur Paloh ini terutama di bagian pendidikan formal anak-anak setempat. Mulai dari orang tua murid yang berfikir konservatif atau menganggap sekolah itu tidak penting karena mereka berfikir bahwa dengan durasi waktu yang di habiskan oleh anak mereka di sekolah dapat lebih bermanfaat dan menghasilkan (uang) dibandingkan mereka menghabiskan waktu di sekolah. Pesimisme terhadap sekolah para orang tua murid tersebut juga datang dari pandangan mereka terhadap beberapa figur sarjana di desa tersebut yang pada akhirnya memiliki pekerjaan sama dengan masyarakat yang hanya lulusan sekolah dasar. Bagi mereka tentu itu merupakan sebuah polemik yang dapat membuat para orang tua murid tersebut berfikir lebih untuk meneruskan pendidikan.

Tampur Paloh merupakan desa terpencil yang terdapat di Provinsi Aceh. Desa dalam arti umum adalah fenomena umum yang dapat dilihat di mana-mana di dunia. Sebagai komunitas kecil, sebagai tempat (permanen) untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya, terutama yang bergantung pada pertanian, desa di setiap tempat cenderung memiliki kesamaan karakteristik tertentu (Rahardjo, 1999). Istilah desa pada awalnya hanya dikenal di Jawa, Madura dan Bali. Desa dan dusun berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kampung halaman, kampung halaman atau tempat kelahiran. Dusun digunakan di Sumatera Selatan dan Batak. Ciri utama desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (permukiman) bagi kelompok masyarakat yang relatif kecil. Dengan kata lain, ciri khas suatu desa adalah keterikatan warganya pada suatu wilayah tertentu. Keterikatan pada kawasan ini tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga untuk menunjang kehidupan mereka (Rahardjo, 1999). Desa terpencil adalah daerah pedesaan yang terisolasi dari pusat-pusat pertumbuhan daerah atau tempat-tempat lain karena kurang atau kurang sarana transportasi (prasarana), sehingga menghambat pertumbuhan daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Desa Tertinggal

Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, hal itu dijelaskan Pasal 2 Perpres: Pasal 2 (1) Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria: (a) perekonomian masyarakat, (b) sumber daya manusia, (c) sarana dan prasarana, (d) kemampuan keuangan daerah, (e). aksesibilitas; dan (f) karakteristik daerah.

Daerah tertinggal merupakan situasi yang tidak jarang di temui di Indonesia. Menurut perpres 2020 terdapat 62 kabupaten tertinggal yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024:

Table 1. Daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024

No	Provinsi	Kabupaten
1	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara.
2	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Kepulauan Mentawai
3	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas Utara
4	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesisir Barat
5	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Utara. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malak
6	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi
7	Provinsi Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Talibau
8	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak
9	Provinsi Papua	Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai

3.2. Sekolah Formal Desa Tampur Paloh

Desa Tampur Paloh memiliki sarana pendidikan yang sangat terbatas. Desa tersebut hanya memiliki 1 perwakilan sekolah dari tiap jenjang pendidikan dari sd sampai dengan sma. Namun hal itu berbanding lurus bila kita tinjau dengan jumlah peserta didik yang juga sedikit. Setidaknya total peserta didik dari sd sampai dengan sma hanya berada di angka 102 siswa. Dengan total jumlah sekian tentu intensitas persaingan akademik siswa di sana tidak setinggi di sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik yang banyak. Sehingga tidak jarang siswa di sana bolos dari kelas serta memiliki motivasi belajar yang rendah.

3.2.1. SDN Tampur Paloh

SDN Tampur Paloh merupakan satu-satunya sekolah negeri di desa tersebut yang dipimpin oleh kepala sekolah bernama Ahmad Hidayat. SD tersebut memiliki 61 murid serta 6 ruang kelas. Keadaan infrastruktur terbilang yang paling bagus jika di dibandingkan dengan SMP dan SMA Merdeka yang terdapat tidak jauh dari SD tersebut. Walau demikian tentu SD tersebut masih belum cukup untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan 2021 (SNP) di PP No 57 Tahun 2021 pasal 32 ayat (3):

Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:

- a. investasi lahan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. modal kerja tetap.

Poin kedua tentang penyediaan sarana dan pra sarana belum dapat di penuhi oleh pihak yang bertanggung jawab akan sd tersebut. Sebut saja fasilitas lab komputer, bukan rahasia umum bawa desa Tampur Paloh merupakan satu dari kebanyakan wilayah di Indonesia yang belum terjangkau jaringan seluler, seperti kebanyakan desa serupa lainnya Tampur Paloh kesulitan mengikuti mobilitas perkembangan zaman. Hal itu berdampak langsung kepada administrasi sekolah yang lamban dan mngandalkan utusan yang berada di luar desa. Hal itu tentu mmbuat pihak sekolah untuk terus bersaing dan berinovasi sesuai dengan zaman. Tidak jarang informasi penting baik itu pendidikan maupun non pendidikan yang wajib di ketahui oleh seluruh sivitas akademika di Nusantara.

Ketertinggalan SDN Tampur Paloh layak menjadi *mapping priority* perencanaan pembangunan daerah bahkan nasional demi memaksimalkan potensi peserta didik yang seharusnya dapat timbul dari daerah Tampur Paloh tersebut. Kekurangan diatas tentu merupakan tembok penghalang bagi potensi anak desa Tampur Paloh untuk bersaing dengan peserta didik lain. Sehingga itu dapat menyamakan kesempatan setiap peserta didik untuk bersaing.

3.2.2. Yayasan Merdeka Tampur Paloh

Yayasan Merdeka Tampur Paloh merupakan yayasan berlandaskan inisiatif seorang bernama Ali Muda Tinendung (45) atas nama kemanusiaan. Yayasan itu berdiri pada tahun 2006 pasca banjir bandang melanda desa Tampur Paloh ketika itu Pak Ali yang tergabung di salah satu LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan di utus untuk menjadi relawan untuk membantu korban banjir di Desa Tampur Paloh. Saat itu dia merasa tersentuh karena banyak sekali anak-anak setempat yang mengalami ketertinggalan pengetahuan diakibatkan lambatnya sistem informasi menjangkau daerah mereka, tak hanya itu pengetahuan akademik masyarakat setempat juga terbilang tertinggal jauh dari daerah-daerah lain. Informasi sepeenting Tsunami di Banda Aceh bahkan masih ada beberapa dari mereka yang tidak tahu, "jangan berita nasional, ada seorag bapak-bapak disini yang gak tahu tentang Tsunami di Banda Aceh" pungkasnya. Meninjau situasi itu, hati Ali tergerak. Ia terdorong untuk berbuat sesuatu untuk anak-anak di Desa Tampur Paloh. Pada akhirnya dengan semangat yang bulat dan kuat, ia beserta teman-temannya mendirikan SMP Merdeka yang juga merupakan SMP pertama di kecamatan itu.

Mulanya dia tergabung dengan satuan tanggap darurat bencana alam di daerah terkait. Pasca banjir, di daerah yang baru(relokasi), Ali berperan sebagai satuan pengasuhan anak kecil terdampak bencana banjir. "Lalu setelah berbincang-bincang tergasalah kelompok diskusi. Berlalu 6 bulan baru muncul kepikiran sekolah," kata Ali. Gagasan ini landasi atas kecemasan wali generasi muda saat itu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kata Ali, ibu dari anak-anak waktu itu merasakan kekhawatiran akan nasib anak mereka selepas mengenyam pendidikan SD, jika belum terdapat tingkatan pendidikan di atas SD di daerah tersebut. "Terbentuklah sekolah tanpa gedung ini. Mereka sekolah di mana-mana, di pinggir sungai," kata dia. Dalam perjalanannya, Ali yang juga adalah kepala sekolah perdana SMP Merdeka mengaku anggaran operasional sekolah ditanggung melalui sistem patungan. Karena belum terdapat dana bantuan dari pemerintah yang terkait.

SMP Merdeka adalah sekolah menengah yang hingga saat ini masih tergolong terisolir disebabkan lokasinya yang sangat jauh menuju arah hulu sungai. Lokasi Desa Tampur Paloh sangat sulit diakses, daerah sekitar masih dikepung hamparan bukit-bukit dan wilayah hutan lebat menjadikan satu-satunya jalan ke desa ini adalah via sungai Aceh Tamiang. Ibu kota kecamatan berada condong ke hilir aliran sungai yang alami lebih gampang dijangkau. Ali dan teman-temannya memang berpendirian untuk tidak mengutip iuran kepada para siswa. Tapi saat pertama mendaftar sebagai siswa, pihak sekolah mensyaratkan para calon murid untuk menyerahkan selemba papan kayu dan satu tiang kayu pula. Hal tersebut didasari karena Ali melihat hanya kayu yang mudah diperoleh di desa itu bagi seluruh masyarakat. "Itu yang paling mungkin mereka kasihkan," ucap Ali.

Yayasan Merdeka sekarang tentu merupakan buah dari kerja keras Pak Ali yang selama beberapa tahun membangun dan memajukan Yayasan tersebut. Sampai sekarang meski terbilang serba kekurangan namun

setidaknya telah ada pihak-pihak yang menjaga kestabilan Yayasan ini agar terus berjalan. Dana BOS merupakan sumber utama akomodasi sekolah ini, peruntukan turunannya meliputi:

- a. Gaji guru;
- b. Biaya sarana dan prasarana;
- c. Biaya transportasi

Yayasan merdeka juga terdiri dari beberapa bangunan semi permanen diantaranya:

- a. Bangunan kelas 7;
- b. Bangunan kelas 8;
- c. Bangunan kelas 9;
- d. Bangunan kelas 10 merangkap perpustakaan;
- e. Bangunan kelas 11;
- f. Bangunan kelas 12;
- g. Bangunan asrama putra;
- h. Bangunan asrama putri;
- i. Bangunan madrasah;
- j. Mushala;
- k. Gudang;
- l. Kantin;
- m. Toilet



Figure 1. Bangunan kelas 11

Demikian bangunan kelas yang dimiliki oleh Yayasan Sekolah Merdeka yang berbeda dari kebanyakan sekolah yang ada. Perbedaan itu juga bukan merupakan halangan peserta didik disana untuk mengenyam pendidikan. Menurut Ali (45) bahwa kebanyakan peserta didik disana tidak terlalu menyukai bangunan yang memiliki tembok untuk menjadi ruang kegiatan belajar mengajar. Bahkan pengakuan Bidinsyah (18) alih-alih merasa semangat belajar di ruangan tertutup mereka justru merasa panas dan tidak betah, "gak enak bang di madrasah (ruangan tertutup) ngantuk kita jadinya, lebih enak di pondok macam gin" dari perspektif itu tentu terbentuknya standar ganda bagi kelayakan standar ruang kegiatan belajar (RKB). Tentu standar moderat yang menengahi semua pihak seperti yang telah dibentuk oleh pemerintah juga hal penting. Namun persepsi barusan meluaskan sedikit pengetahuan kita bahwa kenyamanan belajar juga dapat bergantung pada persepsi masyarakat setempat yang mengakses langsung sarana tersebut.



Figure 2. Kelas 10 merangkap perpustakaan

Keterbatasan yang dialami Yayasan Merdeka Tampur Paloh mendorong unsur pengurusnya untuk lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka sebagai yayasan pendidikan. Seperti bangunan pada gambar di atas itu merupakan bangunan kelas 10 Yayasan Merdeka Tampur Paloh di lantai 2 yang merangkap sebagai perpustakaan di lantai 1, bangunan ini merupakan hasil bantuan dari Pertamina yang disalurkan melalui Pertamina EP Rantau.

3.2.2.1. Kegiatan Yayasan Sekolah Merdeka

Yayasan Sekolah Merdeka dengan segala keterbatasannya mencoba mengikuti kegiatan persekolahan yang harus di laksanakan oleh sekolah. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh mereka tentu bukan hal yang mudah bagi mereka untuk mengadaptasi kegiatan-kegiatan yang harus diselenggarakan baik secara rutin harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Namun pihak sekolah tetap berusaha melaksanakan (kegiatan persekolahan) semaksimal mungkin.

Ada beberapa kegiatan persekolahan yang dilakukan oleh yayasan sekolah merdeka. Berikut merupakan daftar kegiatan persekolahan yang di selenggarakan oleh Yayasan Sekolah Merdeka di tengah keterbatasannya:

a. Upacara Hari Senin 1 Bulan Hingga 2 Bulan Sekali

Upacara hari senin tentu sudah melekat lama dalam daftar kegiatan wajib persekolahan sejak dari bangku sekolah dasar. Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah.

Upacara di sekolah paling sedikit dilaksanakan pada pagi hari setiap:

- Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus
- Hari Senin; dan
- Hari besar nasional.

Terdapat beberapa tujuan diadakan upacara hari senin. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Mohamed, mengatakan bahwa upacara tersebut memiliki efek pendidikan pada siswa. Dalam pandangannya, siswa setidaknya memiliki beberapa fungsi ritual: (1) Ritual melatih siswa menjadi pemimpin yang dapat mengatur tim, (2) Upacara memberi kesempatan kepada kepala sekolah untuk secara langsung memperkenalkan semua siswa tentang apa yang harus dilakukan minggu depan; (3) Upacara juga menumbuhkan rasa persatuan di antara siswa, dan setiap kelas bergiliran untuk berpartisipasi dalam staf upacara. Tujuan lain juga tertuang di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah. Pelaksanaan Upacara di sekolah bertujuan untuk:

- Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Membiasakan bersikap tertib dan disiplin;
- Meningkatkan kemampuan memimpin;
- Membiasakan kekompakan dan kerjasama;
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab; dan
- Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Tentu besar harapan pihak sekolah untuk menyelenggarakan upacara itu secara rutin selama 4/30 hari, namun masih banyak keterbatasan seperti anggota upacara yang terlalu sedikit, tingkat kepemilikan sepatu dari para murid tergolong rendah, kepemilikan seragam sekolah minim dan segala masalah yang lainnya, sehingga memaksa mereka untuk melaksanakan upacara tersebut kurang dari 3/30 hari.



Figure 3. Kegiatan upacara hari Senin.

Gambar diatas merupakan gambar kegiatan upacara hari senin yang dihadiri +- 95% murid dari total 100% murid. Tingginya presentase murid yang hadir dalam upacara tersebut tidak membuat upacara tersebut di isi oleh banyak murid. Hal itu tentu berasal dari sedikitnya total murid yang terdaftar di sekolah tersebut.

b. Kegiatan Latihan Pidato

Yayasan Merdeka memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang unik dan berbeda dari yang lain. Latihan pidato merupakan salahsatu kegiatan mingguan yang diwajibkan kepada seluruh anak SMA di sana. Para siswa SMA diwajibkan menulis naskah pidato dan mempersiapkan dirinya selama seminggu, untuk tampil pada hari rabu pagi untuk berpidato di depan penonton yang terdiri dari teman-temannya yang berasal dari SMA, sebelum tampil mereka yang mendapat giliran berpidato harus melaporkan naskahnya kepada guru mereka dan meminta bukti laporan berupa tanda tangan guru tersebut.



Figure 4. Siswa yang sedang berpidato



Figure 5. Para siswa menjadi penonton pidato

Pidato memiliki manfaat yang sangat banyak. Jika para siswa sejak dini terbiasa berbicara di depan publik, tentu hal itu akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berbicara di depan publik. Berbicara di depan publik merupakan sebuah keahlian yang sangat diperlukan bagi para siswa untuk menghadapi masa depannya dalam bersaing di dunia kerja.

c. Ujian Berbasis Komputer

Ujian berbasis komputer merupakan kendala besar bagi Yayasan. Tentu bagi sekolah pada umumnya ujian berbasis komputer bukan lagi merupakan masalah yang berarti, para murid cukup pergi menuju lab komputer yang telah di sediakan oleh sekolah yang berada di dalam lingkungan sekolah dan langsung mengerjakan soal yang tersedia. Hal ini juga tidak dapat di rasakan oleh anak-anak di desa Tampur Paloh, karena untuk memiliki komputer saja sekolah belum mampu, bilapun sekolah memiliki komputer tentu jaringan seluler juga di perlukan agar sekolah dapat bergabung kepada ujian yang memerlukan koneksi tersebut. Oleh karna itu para siswa harus merantau selama beberapa hari ke Kota Langsa untuk

melaksanakannya. Biaya akomodasinya terdiri atas biaya getek Rp.50.000 perjalanan pulang pergi, Rp.50.000 untuk biaya menyewa mobil menuju langsung dari Kuala Simpang, lalu Rp.100.000 untuk biaya makan dll selama 4 hari. Untuk biaya tempat tinggal para siswa disediakan oleh pihak sekolah yang dipusatkan ke rumah Pak Ali yang juga merupakan kantor yayasan yang memobilisasikan administrasi sekolah dari kota langsung.



Figure 6. Proses ujian berbasis computer di rumah Pak Ali

3.3. Presepsi Wali Murid Tentang Studi Formal

Tidak seluruh wali murid di seluruh Indonesia sepakat akan pentingnya studi formal. Hampir semua wali murid pada umumnya sepakat akan pentingnya wajib belajar 12 tahun, bahkan sebagian lagi sepakat bahwa studi formal sampai jenjang perguruan tinggi itu penting untuk setiap peserta didik. Namun hal itu tidak berlaku pada sebagian masyarakat di Desa Tampur Paloh dan mungkin desa-desa serupa lainnya, alih-alih menganggap hal tersebut penting mereka justru beranggapan bahwa sekolah itu tidak ada gunanya. Hal itu bukan tanpa alasan, landasan utama yang mereka yakini adalah terdapat beberapa figur sarjana di desa tersebut yang memiliki profesi sama bahkan lebih rendah dari orang-orang yang tidak lulus smp. Para sarjana +- 6 orang saja, namun mereka semua hanya menjadi illegal logger (pembalok), perangkat desa, peladang nilam, dan penangkap ikan. Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman nyata perbatasan yang tidak sah atau belum mendapat izin dari pemerintah daerah., sedangkan illegal logger merupakan pelaku pelaksanaannya, disana populer dengan nama pembalok dan membalok. Peladang nilam juga merupakan profesi rata-rata masyarakat setempat, Nilam ini adalah semak tropis yang menghasilkan minyak esensial yang disebut sama (minyak nilam). Daun tanaman ini biasanya digunakan untuk mengekstrak minyak, dan diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, obat nyamuk, dan digunakan dalam industri kosmetik. Dalam perdagangan internasional, minyak nilam disebut minyak nilam (dari kata Tamil pachai (hijau) dan ellai (daun) karena minyaknya disuling dari daunnya). Aroma minyak nilam dikenal sebagai "kaya" dan "kaya", dan telah digunakan sebagai parfum dan dupa atau setinggi dalam tradisi oriental selama berabad-abad. Dibandingkan dengan minyak atsiri lainnya, harga minyak nilam adalah yang tertinggi. Namun di samping hal itu para sarjana yang berujung pada profesi yang sama dengan masyarakat lain inilah yang menguatkan apatisme wali murid akan pendidikan, terutama pendidikan formal.

Biaya yang mahal merupakan faktor kuat timbulnya persepsi tersebut. Pada umumnya masyarakat Tampur Paloh berada di bawah garis kemiskinan, belum terdapat masyarakat tersebut yang memiliki penghasilan tetap, kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan penghasilan harian yang didapat dari, (a)berladang, (b)ojek, (c)illegal logger, (d)kuli bangunan, (e)peternak, (f)pedagang kelontong, (g)penjual kue basah, (h)supir getek dan lain-lain. Tentu melalui segala penghasilan yang dihasilkan melalui profesi-profesi yang tertera di atas, sangat sulit bagi para wali murid untuk dapat melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang perkuliahan, Bahkan untuk melanjutkan sekolah menengah saja para wali murid cenderung atau condong ragu, karena bagi mereka waktu yang digunakan para peserta didik di sekolah dapat mereka gunakan untuk membantu dan meringankan beban mereka para wali murid untuk mencari nafkah melalui semua pekerjaan di atas, para wali murid memiliki persepsi bahwa, jika kita bekerja maka hasil yang didapat akan langsung diterima seketika, mereka jarang sekali berfikir jangka panjang yang dapat diperoleh oleh para siswa jika mereka berhasil mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

4. KESIMPULAN

Pendidikan formal di Desa Tampur Paloh sangat jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan pendidikan formal di wilayah-wilayah lainnya. Sebut saja di desa simpang di kabupaten yang sama, mereka telah terjangkau oleh jaringan seluler yang membuat mereka dapat mengakses atau menggunakan informasi umum dengan baik. Informasi-informasi seperti kapan penyelenggaraan ujian serentak berbasis komputer mereka dengan mudah mendapatkannya, hal itu tidak dialami oleh sekolah-sekolah yang terdapat di Desa

Tampur Paloh, bahkan mereka (para siswa) harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi menuju Kota Langsa untuk melaksanakan ujian. Belum sampai di situ mereka harus mengumpulkan dana lagi untuk biaya konsumsi selama beberapa hari ketika mereka ujian. Tentu itu merupakan keluhan bagi mereka kepada pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka untuk memenuhi dan merealisasikan kemudahan bagi mereka untuk mengikuti ujian. Bahkan dari segi infrastruktur pendukung pendidikan juga tergolong belum layak, seperti bangunan yang tidak memenuhi standarisasi yang berlaku. Hal itu juga besar harapan masyarakat dan para guru setempat agar pemerintah menyoroti masalah tersebut. Diharapkan dengan demikian seiring meningkatnya kualitas studi formal di desa Tampur Paloh dan meningkat pula kualitas lulusan Yayasan Merdeka dan mereka (siswa) bisa mendapatkan pekerjaan yang memenuhi harapan para wali murid, sehingga dengan alamnya stigma bahwa pendidikan formal itu tidak penting bagi para wali murid bisa perlahan memudar dan kemudian menghilang. Dengan demikian tentu akan berdampak baik kepada kemajuan nasional dan sejalan dengan makin tergaungnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfida, R., Usman, S., & Ruslan. (2016). Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/459>
- Badri, M. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun). *Jurnal Dakwah Risalah*, 27(2), 62–73. <https://doi.org/10.24014/JDR.V27I2.2514>
- Elsa, E. (2017). Strategi Pengembangan Desa Tertinggal di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. *Jurnal Spasial*, 1(1). <https://doi.org/10.22202/JS.V1I1.1573>
- Evanirosa, E. (2020). Pendidikan Nilai Dalam Budaya Sumang Etnik Gayo. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 78–98. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V5I6.1325>
- Hella, P. M. (2015). Perencanaan Skenario Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Alam di Wilayah Pesisir Kabupaten Malang (Studi pada Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang) | Jurnal Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1119>
- Hendrayady, A. (2010). Strategi Pembangunan Desa Terpadu Suatu Pilihan Paradigma People Centered Development. *Jurnal Non Penelitian*.
- Horne, H. H. (1904). *The Philosophy of Education: Being the Foundations of Education in the Related Natural and Mental Sciences*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pub. L. No. 78 (2014).
- Islami, I. P. (2018). *Nilai-nilai islam dalam upacara adat perkawinan etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38177/1/INTAN PERMATA ISLAMI-FAH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38177/1/INTAN%20PERMATA%20ISLAMI-FAH.pdf)
- Iswanto, S. S. I., Nurasih, N., & Putri, H. (2020). Sulam Kerawang Gayo: Budaya Lokal, Bernilai Karakter dan Sebagai Identitas Bangsa. *Diakronika*, 20(2), 88–100. <https://doi.org/10.24036/DIAKRONIKA/VOL20-ISS2/154>
- Kancana, S. (2011). Scenario Planning Sebagai Alat Formulasi Strategi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8. <http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/6230>
- Kottak, C. P. (1997). *Cultural Anthropology Appreciating Cultural Diversity*. McGraw Hill.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lubis, D. (2009). Kajian Telaahan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Otonomi Daerah. *Forum Ilmiah Indonusa*, 6(1).
- Melis, A., & Muthalib, A. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi*. <https://docplayer.info/33528479-Analisis-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-desa-studi-di-desa-wawolesea-kecamatan-lasolo-kabupaten-konawe-utara.html>

-
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publication.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V7I2.2161>
- Muhi, A. H. (2011). *Fenomena Pembangunan Desa*. http://hegarmanah-jatinangor.blogspot.com/p/blog-page_18.html
- Mustafa, A., & Amri, A. (2017). Pesan Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo Di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(3). <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/4059>
- Oktavia, S. (2011). Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 2(1). <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/275>
- Ova Emilia, R., & Wahyuni, B. (2012). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 25(2), 51. <https://doi.org/10.22146/bkm.3564>
- Pramana Putra, E., Lis Purnamadewi, Y., & Sahara, S. (2015). Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal Di Indonesia. *TATALOKA*, 17(3), 161–171. <https://doi.org/10.14710/TATALOKA.17.3.161-171>
- Puspasari, A. (2016). *Arahan Pengembangan Desa Tertinggal Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Infrastruktur* [Institut Teknologi Sepuluh Nopember]. <https://repository.its.ac.id/72524/>
- Putri, S. A., & Salam, N. E. (2017). Etnografi Komunikasi Tradisi Tolak Bala Menyiee Suku Melayu Petalangan Desa Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13081>
- Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. UGM PRESS - Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Gadjah Mada.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal de Jure*, 3(2). <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V3I2.2144>
- Seran, E. Y. (2020). Kearifan Lokal Rumah Betang Suku Dayak Desa Dalam Perspektif Nilai Filosofi Hidup (Studi Etnografi: Suku Dayak Desa, Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai). *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 28–41. <https://doi.org/10.31932/JPK.V5I1.703>
- Tumanggor, R. (2007). Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 1–17. <https://doi.org/10.33007/SKA.V12I1.615>
- Wiradnyana, K. (2015). Perkembangan Religi Prasejarah: Tradisi Masyarakat Gayo. *AMERTA*, 33(1), 1–12. <https://doi.org/10.24832/AMT.V33I1.209>
-